

PERAN INDONESIA SEBAGAI PRESIDEN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TAHUN 2019

David William Seba*

*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

*Coessponding Author: davidseba@gmail.com

ABSTRAK

Tahun 2019, Indonesia pernah mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Kesempatan tersebut seharusnya bisa membuat Indonesia dapat memainkan perannya lebih baik, khususnya dalam merealisasikan seluruh agenda Indonesia ketika menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Sejak menjadi anggota DKK PBB Indonesia telah menetapkan 4 Isu Prioritas dan 1 Isu Perhatian Khusus. Dengan menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2014), artikel ini akan mengidentifikasi mengapa Indonesia tidak dapat maksimal memanfaatkan posisinya ketika menjadi presidensi DK PBB, untuk merealisasikan isu-isu prioritas yang sudah ditetapkan. Temuan penelitian menggambarkan beberapa penyebab mengapa Indonesia tidak dapat maksimal dalam memanfaatkan posisinya sebagai presidensi DK PBB yaitu: isu yang diangkat, adanya hak veto yang dimiliki oleh negara-negara *super power*, dan masa jabatan yang terlalu singkat.

Kata Kunci: Peran; Presidensi DK PBB

ABSTRACT

In 2019, Indonesia had the opportunity to serve as President of the United Nations Security Council (UNSC). This opportunity should have enabled Indonesia to play a better role, especially in realizing Indonesia's entire agenda when it was a non-permanent member of the UN Security Council. Since becoming a member of the UN Security Council, Indonesia has determined 4 Priority Issues and 1 Issue of Special Attention. Using qualitative methods (Creswell, 2014), this article will identify why Indonesia was unable to make the most of its position when it was the UNSC presidency, to realize the priority issues that have been determined. The research findings illustrate several reasons why Indonesia is unable to maximize its position as the UNSC presidency, namely: the issues raised, the existence of veto rights held by super power countries, and too short terms of office.

Keywords: *Role; United Nation Security Council Presidency*

PENDAHULUAN

Indonesia berhasil terpilih untuk keempat kalinya sebagai Anggota Tidak Tetap (*Elected 10/E-10*) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020 pada tanggal 8 Juni 2018. Secara resmi Indonesia memulai keanggotaannya sebagai bagian dari pengambilan keputusan di Dewan Keamanan pada 1 Januari 2019. Terpilihnya Indonesia juga tidak terlepas dari janji kampanye yang mengusung tema "*True Partner for Peace*" berhasil membawa Indonesia meraup suara 144 dari 190 anggota PBB yang hadir, untuk mewakili kawasan Asia dan Pasifik di DK-PBB, menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya berakhir pada Desember 2018. Indonesia terpilih bersama 4 negara lainnya, yaitu Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Adapun 5 negara E-10 lainnya ialah Polandia, Guinea Ekuatorial, Pantai Gading, Peru, dan Kuwait. (Kemlu, 2019)

Bagi pelaksanaan keanggotaan tidak tetap Indonesia periode 2019-2020, Indonesia telah menetapkan 4 Isu Prioritas dan 1 Isu Perhatian Khusus. Pertama, melanjutkan kontribusi Pemerintah RI dalam upayanya mewujudkan perdamaian dunia, antara lain melalui memperkuat ekosistem/geopolitik perdamaian dan stabilitas dengan peningkatan *Peacekeeping* dan *Peacebulding*, Peningkatan kualitas dan keefektifan misi pemeliharaan perdamaian.

Memajukan kemitraan "*partnership*" dalam *sustaining peace*; dan Meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian. Kedua, membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam hal ini ditekankan perlunya penguatan organisasi regional, mengingat tantangan saat ini yang sangat dinamis, maka peran organisasi regional penting dan dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah yang ada. Ketiga, meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan DK PBB untuk memerangi terorisme, ekstremisme, dan radikalisme, Menciptakan pendekatan komprehensif, Mengatasi sumber akar dari terorisme, radikalisme dan *violent extremism*. Empat, Pemerintah RI juga akan mencoba untuk mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Memastikan perdamaian, keamanan dan stabilitas untuk memastikan pemenuhan Agenda 2030 (*Sustainable Development Goals*), termasuk di Afrika. Membentuk Kemitraan Global dalam membahas implikasi keamanan pada ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup. Di samping itu, Indonesia juga akan memberikan perhatian khusus pada isu Palestina. (Kemlu, 2019)

Dewan Keamanan PBB merupakan badan terkuat di PBB yang mempunyai legitimasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara sedangkan badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi terhadap para anggota, Dewan Keamanan PBB juga mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dalam organ utama PBB, Dewan Keamanan PBB ialah salah satu dari enam badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Piagam PBB memberikan mandat terhadap Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan terhadap Dewan Keamanan untuk: (dasar hukum Piagam PBB bab V Pasal 24 Ayat 2) Menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia. Merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai. Meminta seluruh anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik. Melaksanakan keputusan dewan keamanan secara militer, atau dengan cara-cara lainnya. (dasar hukum piagam PBB bab V) Dewan ini mempunyai lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap, anggota tetapnya ialah, Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dalam kaitannya dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia.

Prinsip dasar pelaksanaan keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB ialah Pancasila, UUD 1945, dan Dasasila Bandung sebagai produk diplomasi monumental Indonesia yang menjadi landasan tata pergaulan masyarakat dunia. Sejalan dengan prinsip polugri yang membumi, keanggotaan Indonesia pada DK PBB perlu membawa manfaat nyata bagi rakyat, baik dari sisi politis maupun ekonomi. Bentuk perwujudan mandat konstitusional UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, memungkinkan Indonesia menerapkan perspektif Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Dasasila Bandung dan prinsip Polugri bebas aktif, yaitu mendorong pendekatan yang lebih berimbang dan menyuarakan kepentingan negara berkembang. Indonesia memiliki visi untuk menjadi bagian dari 10 besar negara penyumbang personel dan menempatkan 4.000 personel di berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (MPP PBB).

Perlu disadari bahwa keanggotaan Indonesia ialah untuk periode 2 tahun, dan selanjutnya Indonesia akan kembali berada di luar DK, terbilang singkat namun akan memiliki dampak yang besar jika dijalankan secara maksimal. Dalam kaitan ini, salah satu isu yang secara konsisten disuarakan Indonesia ialah perlunya reformasi DK agar selaras dengan tatanan global yang lebih inklusif. Karenanya, kesempatan keanggotaan pada DK membuka peluang yang sangat strategis untuk mendorong proses reformasi DK dari dalam DK itu sendiri. Selama periode keanggotaan Indonesia di DK PBB pada tahun 2019-2020, Indonesia akan menjadi Presiden DK PBB dua kali, yaitu bulan Mei 2019 dan bulan Agustus 2020. Indonesia juga memegang *penholdership* (tanggung jawab untuk penyusunan dokumen sidang DK PBB, seperti rancangan resolusi, *press statement*, dsb). Di samping itu, Indonesia juga akan menjadi Ketua pada sejumlah Badan Subsider atau Komite di bawah DK PBB, terkait penanggulangan terorisme dan non-proliferasi.

Tahun 2019, Indonesia mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Presiden DK PBB pada bulan Mei. Adapun fokus besar yang diangkat ialah peningkatan kapasitas misi penjaga perdamaian PBB. Sejumlah kegiatan utama selama Presidensi Indonesia bulan Mei 2019 ialah

penyelenggaraan 2 debat terbuka (*open debate*) mengenai misi penjaga perdamaian PBB dan perlindungan warga sipil di wilayah konflik, penyelenggara pertemuan *Arria Formula* mengenai isu Palestina, penyelenggaraan pameran foto mengenai peran Indonesia dalam bidang perdamaian, serta resepsi diplomatik dan pertunjukan budaya. Semua kegiatan yang di agendakan di masa presidensi Indonesia, semuanya terbalut dalam satu tema besar yaitu “Menabur Benih Perdamaian” (*Investing in peace*) Indonesia mengangkat isu-isu utama yang menjadi prasyarat tercapainya perdamaian antara lain aspek pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan Hak Asasi Manusia, pemajuan proses politik yang inklusif serta demokrasi. Melihat banyaknya agenda penting di masa presidensi Indonesia, menjadikan keuntungan bagi Indonesia sekaligus terdapat beberapa hal yang perlu di evaluasi mengingat pentingnya posisi presiden DK PBB bagi Indonesia, antara lain, meningkatkan profil diplomasi Indonesia, terciptanya *legacy* Indonesia yang bermanfaat bagi dunia internasional, berupa *Presidential Statement* mengenai upaya untuk terus memperkuat pelatihan dan kapasitas pasukan perdamaian, dan memajukan isu-isu kepentingan nasional. (Kementerian Luar Negeri. 2019)

Keterwakilan Indonesia sebagai Negara dari kawasan Asia Pasifik, serta satu-satunya Negara Asia Tenggara yang duduk di DK PBB, seharusnya menjadikan isu-isu “Rumah Tangga” kawasan diangkat. Sebagaimana point dua dalam isu prioritas Indonesia di DK PBB menciptakan sinergitas antara organisasi-organisasi regional di kawasan dalam mengatasi konflik di kawasan. Berdasarkan agenda utama di masa presidensi Indonesia terlihat minimnya Indonesia menciptakan Perdamaian melalui peningkatan sinergitas dengan Organisasi Regional. Sebagai anggota tidak tetap Dewan keamanan, tentunya menjadi suatu hal yang mungkin bagi Indonesia untuk menginisiasikan agenda baik formal maupun non formal mengenai sinergitas dengan organisasi-organisasi regional di masa presidensi Indonesia. Agenda sinergitas dengan organisasi regional bisa saja dibahas dalam masa presidensi Negara berikutnya, namun di masa presidensi Indonesia tentunya memiliki dampak yang besar terlebih bagi kawasan di mana Indonesia berada, yaitu Asia Tenggara. Mengingat Indonesia sering menyuarakan isu reformasi DK PBB, tentunya sinergitas dengan organisasi regional merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam upaya untuk mereformasi DK PBB dan mewujudkan perdamaian dunia.

Penguatan organisasi-organisasi di kawasan sudah semestinya juga menjadi bagian penting yang dibahas, mengingat peran yang dimainkan organisasi-organisasi di kawasan sangatlah penting, permasalahan, konflik, dan sengketa akan semakin cepat penyelesaiannya jika dibantu dengan peran organisasi tersebut. Misalnya saja dengan sinergitas bersama ASEAN dimana wilayah Indonesia berada, tentunya akan menjadi jembatan solusi bagi permasalahan di Laut China selatan bahkan konflik di Myanmar. Penyelesaian konflik Israel-Palestina, konflik di Afghanistan, konflik di Asia Selatan, bahkan Konflik di Asia Timur, akan semakin cepat diselesaikan jika peran organisasi-organisasi di kawasan tersebut dijalankan dan tentunya mendapat dukungan dunia internasional, dalam hal ini DK PBB. Sebagaimana Indonesia menjadi perwakilan wilayah Asia Pasifik tentunya kawasan-kawasan tersebut menjadi prioritas dalam sinergitas dengan organisasi-organisasi regional.

Indonesia dengan konsep awalnya menabur benih perdamaian (*Investing in peace*), akan menjadi suatu kenyataan dan tidak sekadar retorika jika peran Indonesia dalam memegang Presidensi DK PBB yang terbilang singkat dapat dijalankan dengan maksimal dan memegang teguh prinsip awal DK PPB dan prinsip Pancasila, UUD 1945, dan Dasasila Bandung sebagai Prinsip Indonesia di DK PBB.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa ialah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini. Dalam uraian ini ditelaah sejarah pembentukan, asas dan tujuan, keanggotaan, struktur dan cara kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 1 Januari 1942 di Washington telah ditandatangani oleh 26 negara demokratis suatu pernyataan pengerahan segala tenaga untuk membinasakan kekuasaan negara totaliter. Deklarasi itu sebenarnya merupakan perjanjian militer, namun deklarasi itu juga dianggap sebagai pangkal pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena deklarasi itu merupakan pangkal ikatan

negara-negara yang menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang telah terputus oleh pecahnya Peran Dunia II. Namun pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya bermula dari Deklarasi Moskow tanggal 1 November 1943. Dalam Deklarasi itu, Menteri Luar Negeri negara-negara Amerika Serikat, Cina, Inggris dan Uni Soviet memutuskan dalam waktu dekat akan mendirikan organisasi internasional. Pada bulan September-Oktober tahun 1944 diadakan pembicaraan lebih lanjut tentang pembentukan organisasi internasional itu antar perutusan empat negara tersebut di Washington. (Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*)

Dalam upaya mencapai tujuannya, usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa dituangkan dalam tiga macam organ, yakni organ utama, organ subsidier, dan badan khusus. Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai enam organ utama, yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat. Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan sebagai mekanisme untuk mencegah dan memberhentikan agresi yang dilakukan negara satu terhadap negara yang lain. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, Perang Dingin melumpuhkan kinerja Dewan Keamanan karena negara-negara anggota Dewan Keamanan saling bertentangan. Setelah Perang Dingin, peran Dewan Keamanan menjadi lebih penting di dalam komunitas internasional. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London. Sejak pertemuan pertamanya, Dewan Keamanan telah berkedudukan tetap di Markas Besar PBB di New York. Dewan Keamanan juga melakukan pertemuan di berbagai kota, seperti di Addis Ababa, Ethiopia pada tahun 1972, di Panama City, Panama, dan di Jenewa, Swiss pada tahun 1990. Dewan Keamanan semula beranggotakan 11 negara anggota. Sejak tahun 1965, sejalan dengan perubahan Piagam, Dewan Keamanan beranggotakan 15 negara. Dari 15 anggota itu 5 diantaranya ialah anggota tetap. Mereka itu ialah Amerika Serikat, RRC/Cina, Inggris, Prancis dan Rusia. 10 (sepuluh) anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan dua tahun, yang dipilih bergantian orang setiap tahun.

Untuk memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan perlu dipertimbangkan dua hal yakni bahwa negara tersebut telah memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian, keamanan internasional serta keperluan lain Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa letak geografi negara tersebut sedapat mungkin mewakili seluruh kawasan masyarakat internasional. Masa sidang Dewan Keamanan berlaku selama 12 bulan dalam setahun. Oleh karena itu, negara yang merupakan anggota Dewan Keamanan harus mengirimkan perutusannya yang menetap di New York agar dapat menghadiri rapat yang membicarakan masalah perdamaian dan keamanan internasional yang mendesak. Tugas Dewan Keamanan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tergolong sebagai tugas eksekutif antara lain, Menyelesaikan perselisihan Internasional secara damai, mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan, memilih hakim-hakim internasional, mengawasi wilayah-wilayah sengketa, dalam menangani sengketa antar negara Dewan Keamanan harus mengusahakan penyelesaian secara damai. Dalam hal usaha itu tidak berhasil dan timbul ancaman dan pelanggaran bagi perdamaian serta perbuatan agresi, Dewan Keamanan berwenang untuk memberikan rekomendasi dan menetapkan tindakan yang diperlukan. Tindakan Dewan Keamanan itu dapat merupakan tindakan yang tidak menggunakan kekerasan senjata, misalnya embargo ekonomi, dan dapat juga merupakan tindakan dengan kekerasan senjata, misalnya operasi militer. Dalam ketentuan Pasal 48 Piagam PBB menyatakan bahwa tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan guna pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional dilakukan oleh semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh beberapa diantara mereka, sesuai ketetapan Dewan Keamanan. Keputusan-keputusan demikian dilaksanakan oleh Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara langsung dan melalui tindakan mereka dalam badan-badan internasional dimana mereka menjadi anggota.

Keputusan Dewan Keamanan dibedakan antara keputusan yang bersifat prosedural dan keputusan yang lain. Keputusan yang bersifat prosedural ditetapkan dengan persetujuan 9 suara anggota Dewan Keamanan. Keputusan yang lain ditetapkan dengan persetujuan 9 suara negara anggota termasuk negara anggota tetap Dewan Keamanan. Dalam memutuskan hal-hal yang bersifat prosedural, anggota tetap Dewan 7 Keamanan mempunyai hak veto yakni hak untuk menolak. Bila salah satu anggota tetap Dewan Keamanan menggunakan hak veto, Dewan

Keamanan tidak dapat mengambil keputusan. Adanya hak veto itu dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan, yang dalam Perang Dunia II merupakan sekutu, dalam kebersamaannya harus memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Anggapan itu mulai tahun 1948 tidak dapat dilaksanakan karena Rusia/Uni Soviet memisahkan diri dari kebersamaan itu. Namun dalam menghadapi Perang Teluk tahun 1990-1991 kebersamaan itu tampak pulih kembali.

Setiap anggota Dewan memiliki satu suara, namun hanya lima anggota tetap memiliki hak veto. Hak veto ialah suara negatif yang memungkinkan lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan yang substantif. Rusia telah menggunakan hak prerogatifnya lebih sering dibandingkan dengan anggota tetap lainnya. Contoh terbaru dari di mana hak ini digunakan yaitu, Rusia dan Cina menentang rancangan resolusi yang mengutuk tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah di Suriah dan menyerukan Bashar al-Assad, Presiden Suriah, untuk turun dari jabatannya. Pada tahun 2011, AS memegang hak veto terhadap rancangan resolusi yang mempersalahkan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina. Walaupun demikian, anggota tetap Dewan Keamanan tidak menggunakan hak veto dalam kondisi-kondisi krisis lainnya. Dewan Keamanan berhasil mengadopsi resolusi 1973 (2011) tentang situasi di Libya. Dewan Keamanan memberikan kewenangan terhadap militer untuk melindungi warga sipil dan memberlakukan zona larangan terbang di wilayah udara Libya. Baru-baru ini, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang mengutuk peluncuran roket oleh Korea Utara dan memaksakan pembatasan baru pada perusahaan pelayaran dan lembaga keuangan Korea Utara, serta berusaha untuk memblokir beberapa transaksi keuangan yang sering digunakan oleh para pejabat Korea Utara untuk memperoleh teknologi persenjataan.

Resolusi Dewan Keamanan PBB ialah teks resmi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan. Semua anggota PBB, sesuai dengan Piagam PBB, "setuju untuk melaksanakan dan menerima keputusan Dewan Keamanan". Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi ekonomi dan/atau sanksi lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk aksi militer internasional. Namun, jika Dewan Keamanan menganggap bahwa langkah-langkah itu tidak memadai atau telah terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan akan mengambil tindakan lain yang lebih tegas yang dapat dilaksanakan oleh angkatan udara, angkatan laut, atau angkatan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. (Sefriani. 2019)

B. Presidensi Dewan Keamanan

Dewan ini mempunyai lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Adapun lima anggota tetap Dewan Keamanan berasal dari negara-negara Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II yaitu:

- Republik Rakyat Tiongkok
- Prancis
- Rusia
- Britania Raya
- Amerika Serikat

Keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipegang oleh lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap terpilih. Sebelum 1966, ada enam anggota terpilih, sedangkan anggota permanennya tidak berubah sejak PBB berdiri tahun 1945 kecuali Tiongkok. Anggota terpilih menjabat selama dua tahun di Dewan. Separuh kursi Dewan diperebutkan setiap tahun. Untuk menjamin keberlanjutan geografis, jumlah anggota ditentukan untuk setiap grup regional PBB. Setiap tahun Majelis Umum memilih lima anggota tidak tetap (dari 10 total) untuk jangka waktu dua tahun. 10 kursi non-permanen didistribusikan secara regional sebagai berikut: lima untuk negara di Afrika dan Asia, satu untuk negara di Eropa Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia, dan dua untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Para kelompok regional dibentuk berdasarkan wilayah geografis. Kelompok Eropa Barat merupakan pengecualian karena kelompok ini juga mencakup negara-negara lain, yaitu Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Presidensi Dewan dipegang oleh setiap anggota pada gilirannya selama satu bulan. Peran seorang Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

mencakup penerapan agenda, memimpin pertemuan-pertemuannya dan mengawasi situasi krisis. Seorang Presiden berhak untuk mengeluarkan Pernyataan Presidensiil (atas hasil konsensus antar anggota) dan catatan-catatan yang digunakan untuk menyatakan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Keamanan. (Ade Maman Suherman, 2003)

Presiden memiliki tanggung jawab dari Aturan Prosedur Sementara Dewan Keamanan serta praktik dewan. Peran presiden melibatkan pemanggilan rapat Dewan Keamanan, menyetujui agenda sementara (diusulkan oleh sekretaris jenderal), memimpin rapat, memutuskan pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan dan mengawasi setiap krisis. Presiden berwenang untuk mengeluarkan Pernyataan Presiden (berdasarkan konsensus di antara anggota Dewan) dan catatan, yang digunakan untuk membuat pernyataan yang kemudian dapat dikejar oleh Dewan Keamanan penuh. Presiden juga bertanggung jawab membacakan pernyataan Dewan Keamanan terhadap pers. Pemegang kursi kepresidenan dianggap sebagai "wajah" dan juru bicara DK PBB. Pemegang kursi kepresidenan dapat meminta pihak-pihak yang berkonflik untuk "menahan diri". Presiden mewakili Dewan Keamanan di depan organ PBB lainnya dan negara anggota. Mereka juga meminta anggota untuk berbicara, mengirim pelamar keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke komite DK PBB dan memutuskan perintah pemungutan suara. Terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, presiden bekerja untuk mengkoordinasikan DK PBB dengan organ lain. Presiden memiliki wewenang untuk mengatur poin-poin urutan, yang dapat dilakukan pemungutan suara jika anggota dewan menentang. Mereka juga menyebutkan anggota berbagai organ pendukung, dan umumnya bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Sejak November 2000, presiden umumnya telah menyiapkan makalah latar belakang untuk topik yang sedang dibahas.

Presiden juga terus mewakili negara mereka. Jika negara mereka terlibat dalam konflik yang sedang dibahas DK PBB, mereka diharapkan untuk mundur sementara. Sebaliknya, karena kepresidenan bergilir setiap bulan, semua negara di DK PBB dapat secara merata menekankan masalah-masalah yang penting bagi mereka. Kebanyakan negara bagian tidak permanen memegang jabatan presiden sekali atau dua kali selama masa jabatan dua tahun mereka; Burkina Faso mengubah namanya dari Upper Volta pada Agustus 1984 selama masa jabatannya, dan menyelenggarakannya tiga kali. Presiden sering membuat perbedaan antara ketika mereka berbicara sebagai presiden dan sebagai wakil negara mereka. Davidson Nicol, seorang akademisi, menulis bahwa, meskipun peran Presiden tidak boleh dibesar-besarkan, pekerjaan Dewan, reputasinya dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat dipengaruhi oleh kaliber dan gaya individu yang memimpin organ yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan merupakan poros Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya memelihara dan meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional. Fungsi utama Presidennya ialah untuk membimbingnya secara efektif dan cepat menuju tujuan mulia ini. (Bakry, Umar Suryadi. 2017)

Pada tahun 1981, Sydney D. Bailey, pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa, membagi sejarah DK PBB menjadi tiga era; dari 1946 hingga 1955, 1956-1965, dan 1966 hingga 1981. Pada awalnya, presiden sering bertindak atas inisiatif mereka sendiri tanpa berkonsultasi dengan dewan keamanan. Selama era kedua, dewan keamanan kurang terlibat dalam urusan yang berkaitan dengan Perang Dingin, mengadopsi slogan "Serahkan ke Dag [Hammarskjöld]". Dari tahun 1966 hingga 1981, presiden mulai membahas masalah secara informal sebelum mengadakan sesi formal dan secara umum menjadi lebih efisien. Pada tahun 1947 dan 1948, DK PBB terlibat dalam kemerdekaan Israel dan perang Palestina 1947-1949 berikutnya. Pada Juli 1948, Republik Sosialis Soviet Ukraina memegang kursi kepresidenan. Dewan bertemu pada 7 Juli atas permintaan mediator Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mempertimbangkan apakah itu harus mempromosikan perdamaian. DK PBB sebelumnya telah mengundang perwakilan dari Komite Tinggi Arab dan Badan Yahudi Palestina untuk membahas masalah ini. Dmitry Manuilsky, presiden pada bulan Juli, menyebut Badan Yahudi sebagai 'perwakilan Negara Israel'. Namun, DK PBB belum secara resmi mengakui negara tersebut. Berbagai negara anggota mengkritik tindakannya, dan hanya Amerika Serikat yang mendukungnya. Sebagai tanggapan, perwakilan Komite Tinggi Arab meninggalkan diskusi, dan tidak kembali, menghalangi kemampuan DK PBB untuk merundingkan masalah tersebut. Sejarawan Istvan Pogany menganggap bahwa "Presiden dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk mencapai tujuan pemerintahannya. Pada tahun 1948, presiden secara informal terlibat dalam diplomasi

beberapa kali, yang pertama pada bulan Januari 1948, ketika presiden Belgia meminta agar India dan Pakistan menahan diri dari langkah apa pun yang tidak sesuai dengan Piagam dan dapat mengakibatkan memburuknya situasi. Dalam April, presiden Kolombia bertemu dengan perwakilan Badan Yahudi dan Komite Tinggi Arab untuk membahas kemungkinan persyaratan perdamaian. Belakangan tahun itu, presiden Argentina membentuk 'Komite Teknis untuk Mata Uang dan Perdagangan Berlin'. Pada Agustus 1950, Bailey menulis bahwa pemegang kepresidenan, Uni Soviet, memanipulasi "prosedur Dewan untuk tujuan partisan selama debat di Korea". Presiden juga telah beberapa kali bernegosiasi secara resmi atas nama DK PBB. Pada bulan Februari 1957, atas permintaan DK PBB, presiden Swedia saat itu Gunnar Jarring menyiapkan laporan tentang hubungan India-Pakistan. Dia berkonsultasi dengan kedua negara dan membahas banyak solusi potensial untuk ketidaksepakatan mereka, tidak ada satupun yang disepakati. Tindakan semacam itu umumnya tidak diminta sejak tahun 1970-an. Presiden juga akan mengelola negosiasi yang kurang formal atas permintaan dewan.

Dalam pertemuan 31 Maret 1976 yang membahas agresi Afrika Selatan melawan Angola, pertemuan itu berlanjut hingga lewat tengah malam dan secara teknis 1 April. Thomas S. Boya, wakil dari Benin dan presiden bulan Maret, menawarkan untuk meneruskan jabatan kepresidenan ke China. Meskipun rapat ditunda sebelum keputusan diambil, itu menjadi prosedur yang ditetapkan bagi presiden untuk mundur tepat ketika bulan telah berlalu. Kasus serupa pada 31 Mei 2010 mengakibatkan Nawaf Salam dari Lebanon memberikan kursi kepresidenan terhadap Claude Heller dari Meksiko.

Pada September 1994, selama genosida Rwanda, Rwanda seharusnya memegang kursi kepresidenan, tetapi tidak hadir pada pertemuan Dewan Keamanan sejak 14 Juli. Pada 25 Agustus, Dewan memutuskan untuk mengizinkan Spanyol memegang posisi itu untuk September. Delegasi Rwanda kembali hadir pada 16 September, dan diputuskan bahwa negara tersebut akan memegang kursi kepresidenan pada bulan Desember. Kepresidenan telah diberikan beberapa kali. Yang pertama dari 10 sampai 12 Januari 1950, ketika perwakilan Taiwan menyerahkan diri ke Kuba. Amerika Serikat menyerah pada tahun 1948, Tiongkok pada tahun 1950, India pada tahun 1951, Lebanon pada tahun 1956, Inggris pada tahun 1968. Pada 10 November 1993 perwakilan Cape Verde, José Luís Jesus, menyerahkan diri ke Tiongkok karena ia ialah kandidat untuk pemilihan umum Mahkamah Internasional; dan pada tanggal 15 Desember 1994 perwakilan Rwanda menyerahkan diri ke Argentina. Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet menolak permintaan untuk menyerahkan kursi kepresidenan, AS selama Perang Dingin dan Uni Soviet selama Krisis Kongo.

Taieb Slim, pemegang kepresidenan Tunisia pada September 1980, meminta Iran dan Irak untuk "menghentikan semua aktivitas bersenjata dan semua tindakan yang mungkin memperburuk situasi berbahaya dan menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara damai. Kepresidenan direformasi pada catatan tahun 2010 merevisi fungsinya, sebagian besar berfokus pada peningkatan transparansi. Upaya reformasi tersebut telah dimulai pada 1990-an. Ada berbagai upaya lain untuk mereformasi posisi, seperti mengizinkan perpanjangan waktu selama masa perang. Banyak orang telah menjabat beberapa kali sebagai presiden. Posisi terbanyak ialah 16 kali oleh T. F. Tsiang, perwakilan dari Republik Rakyat China.

C. Indonesia di Dewan Keamanan

Indonesia resmi menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa ke-60 pada tanggal 28 September 1950, yang ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/491 (V) tentang "penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa Bangsa", kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus - 2 November, 1949).

DK PBB ialah organisasi PBB yang tanggung jawab utama ialah pemeliharaan dan keamanan internasional. Organisasi DK sudah ada pada 1945 dan markas besar ada di New York Amerika Serikat. Sebanyak enam negara merupakan anggota tidak tetap. Pada 1965 lewat Amandemen Piagam PBB, anggota tidak tetap bertambah menjadi 10 anggota dari enam anggota. Anggota tidak tetap dipilih sesuai letak geografis dengan lima anggota dari Afrika atau Asia. Satu anggota dari Eropa Timur, dua anggota dari Amerika Latin, dan dua anggota dari Eropa Barat atau daerah lain. Anggota tidak tetap dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan dua tahun. Presiden dipegang oleh setiap anggota yang dipilih secara bergilir. Setiap

anggota memiliki satu suara, namun hanya lima anggota tetap memiliki hak veto. Hak veto ialah suara yang memungkinkan lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB yang substansi. Indonesia pertama menjadi anggota tidak tetap pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yakni 1974-1975, dan 1995-1996. Selanjutnya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 2007-2000. Kemudian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018-2020 bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dominika.

Pada proses pemilihan periode 2018-2020 melalui pemungutan suara, Indonesia memperoleh 158 suara dari total 192 suara anggota yang memiliki hak pilih. Selama menjadi anggota tidak tetap, Indonesia memainkan peranan sebagai suara penengah dan menjembatani serta membentuk konsensus di antara para anggota DK PBB dan luas di negara anggota PBB. Isu yang dibawa Indonesia di antaranya memastikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas untuk pemenuhan agenda 2030 termasuk di Afrika. Kemudian membentuk kemitraan global dalam membahas implikasi keamanan pada ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Lalu dengan meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian. Indonesia juga akan memberikan perhatian khusus pada isu Palestina. Indonesia pernah terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian di berbagai negara yang terjadi konflik. Selama masa jabatan 2007-2008, Indonesia dihadapkan dengan isu program nuklir Iran yang panas dibahas dalam forum DK PBB pada 2007. (Anwar Dewi Fortuna, 2000)

Sikap pemerintah Indonesia di era Susilo Bambang Yudoyono sendiri mendukung program pengembangan energi nuklir Iran—dengan catatan bahwa nuklir Iran hanya akan dipakai untuk tujuan damai. Sedangkan sikap resmi DK PBB sebaliknya: mengeluarkan resolusi penambahan sanksi terhadap Iran karena negeri mullah itu menolak menghentikan aktivitas pengayaan uranium. Suara Indonesia tetap tidak kuasa membendung DK PBB mengeluarkan sederet resolusi untuk merespons Iran. Sebagai catatan, sejak 2006 sampai 2008 ketika Indonesia menjadi anggota tidak tetap, DK PBB mengeluarkan empat resolusi. Masing-masing ialah Resolusi No. 1696 (2006), No. 1737 (2006), No. 1747 (2007) dan Resolusi 1803 (2008). Ketiga resolusi tersebut dikeluarkan untuk merespons program nuklir Iran. Dikutip dari Pusat Penelitian Politik LIPI, Indonesia hanya pernah abstain ketika pemungutan suara untuk Resolusi 1803 di tahun terakhirnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Di era keanggotaan tidak tetap DK PBB periode 1995-1997, Indonesia turut dalam aktivitas yang menentang konflik antara Israel dan Libanon pada 1996. (Botodiningrat, S. 2012)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (John W. Cresswell, 2014), yang akan mengidentifikasi penyebab mengapa Indonesia tidak dapat maksimal dalam merealisasikan program prioritasnya ketika menjabat sebagai presidensi DK PBB tahun 2019. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Terpilihnya Indonesia di Dewan Keamanan PBB Tahun 2019

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat internasional kepada Indonesia. Kampanye yang dilakukan Indonesia ini telah dilakukan sejak 2016 dengan diplomasi berdasarkan rekam jejak Indonesia dan sejalan dengan visi Indonesia untuk DK PBB. Indonesia akhirnya terpilih setelah unggul dari Maladewa yang hanya memperoleh 46 suara.

Terdapat dua konteks terkait pertimbangan negara anggota PBB dalam memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Pertama adalah dukungan murni dimana negara tersebut biasanya melihat kontribusi Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia dan isu-isu keamanan lainnya. Kedua yakni dengan model imbalan dukungan. Pada model kedua, yang paling umum adalah pemberian dukungan bagi negara yang diminta dukungannya oleh Indonesia pada pemilihan anggota tidak tetap DK PBB di

periode yang berbeda. Selain itu juga dapat sebagai sarana saling dukung dalam forum-forum internasional tertentu.

Menurut Presiden Jokowi, ada empat alasan mengapa Indonesia berhasil masuk dalam anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pertama, kondisi dalam Negara yang cenderung stabil dan damai, kontribusi dalam negeri Indonesia memiliki pengaruh yang kuat dalam pencalonan Indonesia di DK PBB. Kedua, rekam jejak dan kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ketiga, Independensi dan netralitas politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Yang terakhir, Peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan yang ada, termasuk negara-negara yang sedang dilanda konflik.

Dalam menjadi anggota tidak tetap DK PBB, artinya Indonesia memiliki kesempatan untuk menyuarakan perhatiannya kepada isu-isu yang selama ini ingin diperjuangkan. Indonesia memastikan bahwa isu Palestina tidak terpinggirkan, tetap berada di radar dan bahkan menjadi pusat perhatian DK PBB. Menurut portal Kemlu RI, secara sinergis Indonesia akan mendukung upayanya di DK PBB dengan penguatan bantuan kemanusiaan dan peningkatan kapasitas bagi rakyat Palestina, baik melalui mekanisme bilateral, trilateral, maupun forum multilateral.

B. Dasar Pelaksanaan Kebijakan Indonesia di Dewan Keamanan PBB

Prinsip dasar penerapan keanggotaan Indonesia tidak tetap di DK PBB adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Dasasila Kota Bandung. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia didasarkan oleh dua landasan pokok, yakni Landasan Idiil Pancasila dan Landasan Konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai landasan idiil sekaligus dasar negara, Pancasila berperan penting dalam menjiwai segenap arah polugri Indonesia. Hal itu termaktub dalam Sila kedua di dalam Pancasila, yakni “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia khususnya dalam pergaulan antar bangsa. Polugri Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila ini kemudian dijelaskan secara lebih eksplisit di dalam UUD 1945, khususnya pada Pembukaan UUD 1945 alinea I dan IV. Pada alinea I disebutkan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” Kemudian lebih jauh disebutkan pada alinea IV bahwa “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” Kedua alinea di atas secara jelas menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari polugri Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. (Kementrian Luar Negeri. 2019. *Menabur Benih Perdamaian Investing in Peace*)

Menlu Retno Marsudi menerapkan amanah konstitusi Indonesia berdasarkan penggalan paragraf ke empat UUD 1945 yang harus dijalankan oleh diplomasi dan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Beberapa elemen yang merupakan amanah bagi pelaksanaan politik luar negeri, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah Indonesia secara konsisten dapat melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dan jati dirinya sebagai negara maritim untuk mewujudkan tatanan dunia yang semakin baik, dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia yang diukur dari target sasaran antara lain. Pertama, tersusunnya karakter kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim. Kedua, menguatnya diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE. Ketiga, Meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia dalam mendorong penyelesaian sengketa teritorial di kawasan. Sejalan dengan prinsip polugri yang membumi, keanggotaan Indonesia pada DK PBB perlu membawa manfaat nyata bagi rakyat, baik dari sisi politis maupun ekonomi. Bentuk perwujudan mandat konstitusional UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, memungkinkan Indonesia menerapkan perspektif Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Dasasila Bandung dan prinsip Polugri bebas aktif, yaitu mendorong pendekatan yang lebih berimbang dan menyuarakan kepentingan negara berkembang

Dasasila Bandung sebagai produk diplomasi monumental Indonesia yang merupakan landasan tatanan sosial masyarakat dunia juga berperan penting dalam kebijakan Indonesia di

DK PBB. Dasasila Bandung yaitu suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia. Adapun isi dari Dasasila Bandung: Pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain. Kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase (penyelesaian masalah hukum) ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. Kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang terakhir, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Dasasila Bandung mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional. Bandung telah melahirkan paham Dunia Ketiga atau "Non-Aligned" terhadap Dunia Pertama Washington, dan Dunia Kedua Moscow. Jiwa Bandung telah mengubah juga struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Forum PBB tidak lagi menjadi forum eksklusif Barat atau Timur saja.

Slogan yang digaungkan di masa kampanye Indonesia yaitu "*A True Partner for Peace*" tentunya menjadi bagian dalam dasar pengambilan keputusan, sebagaimana slogan tersebut menjadi janji Indonesia agar terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Slogan tersebut di sebarluaskan melalui alat diplomasi multilateral Indonesia. Antara lain, saat Menlu RI menghadiri resepsi diplomatik dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 yang digelar di Markas PBB, New York. Pada forum ini Menlu RI menyampaikan slogan kampanye Indonesia dalam pencalonannya bertajuk mitra sejati perdamaian dunia (*A True Partner for peace*), dengan argumentasi bahwa Indonesia telah memberikan banyak kontribusi bagi perdamaian dunia karena memiliki rekam jejak yang jelas bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global. Keseriusan Indonesia dalam menjadi mitra sejati perdamaian dunia diejawantahkan dalam Keinginan Indonesia yang menurut Menlu RI Retno Marsudi, Kemlu RI berupaya untuk merangkul berbagai pihak seluas mungkin untuk terlibat mendukung keanggotaan Indonesia di DK PBB. Hal tersebut akan diwujudkan melalui peningkatan Kemitraan, dialog dengan berbagai pihak demi tercapainya perdamaian, dan kerja sama melalui berbagai lini.

Dialog untuk mencapainya perdamaian, yang merupakan ciri khas diplomasi Indonesia, juga akan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Terlihat, dalam berbagai konflik-konflik yang menjadi fokus perhatian Dewan Keamanan PBB, Indonesia selalu mengedepankan jalan damai, salah satunya melalui dialog. Hal tersebut pun sudah sepantasnya dilakukan mengingat dasar Indonesia dalam melaksanakan Keanggotaannya ialah Pancasila, UUD 1945, dan Dasasila Bandung. Ketiganya secara eksplisit dan implisit memandatkan Indonesia untuk melaksanakan Politik Luar Negeri yang bebas aktif, yang artinya bebas, tidak terikat pada siapapun atau memihak pada siapapun, dan aktif. Artinya selalu peka dengan permasalahan global, hadir bagi Negara yang membutuhkan dan selalu menjadi bagian dari Solusi.

C. Presidensi Indonesia Pada Dewan Keamanan PBB - Mei 2019

Dalam keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan menjabat sebagai Presiden DK PBB pada bulan Mei 2019. Setiap kepemimpinan atau presidensi DK PBB akan berganti setiap bulan selama periode pemilihan berjalan. Menjadi Presiden pada organisasi yang berpengaruh pada perdamaian dunia, menjadikan Indonesia menyiapkan, merencanakan, dan membuat agenda-agenda utama yang akan di bahas dan diputuskan dalam kegiatan formal maupun informal di bawah presidensinya. Mengangkat Tema "*Investing in Peace*" (Menabur Benih Perdamaian) Indonesia mengangkat isu-isu utama yang menjadi prasyarat tercapainya perdamaian antara lain aspek pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan Hak Asasi Manusia, pemajuan proses politik yang

inklusif serta demokrasi. Komitmen Indonesia dalam menabur benih perdamaian tercermin dalam setiap kegiatan yang diprakarsai dan dipimpin Indonesia melalui serangkaian kegiatan utama Presidensi Indonesia. Antara lain, sidang terbuka dengan tema menabur benih perdamaian: penguatan keselamatan dan kemampuan misi perdamaian PBB (*Open debate on investing peace: improving safety and performance of UN peacekeeping*), sidang terbuka mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata (*Open debate on the protection of civilians in armed conflicts*), Diskusi informal DK PBB dalam format *Arria Formula* mengenai pembangunan pemukiman illegal Israel di wilayah pendudukan Palestina (*Arria Formula on Israeli settlements and settlers: core of the occupation, protection crisis and obstruction of peace*), pameran foto di markas besar PBB, dan resepsi diplomatik dan pertunjukan budaya Indonesia. Kesemuanya itu dijalankan dengan menuai pro dan kontra, sebagaimana diplomasi multilateral (organisasi internasional) yang setiap negaranya memiliki pandangan dan posisi dalam suatu isu ataupun konflik yang terjadi.

Pertama, sidang terbuka Dewan Keamanan PBB dalam penguatan keselamatan dan kinerja misi pemeliharaan perdamaian PBB. Sidang terbuka ini merupakan salah satu kegiatan yang diutamakan mengingat rekam jejak Indonesia sebagai salah satu Negara penyumbang pasukan terbesar. Dalam pidatonya, Menlu RI Retno Marsudi mengemukakan empat prasyarat terwujudnya misi pemeliharaan perdamaian PBB yang berdaya-guna. Antara lain, pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan spesifik misi artinya masyarakat internasional tidak dapat lagi menerapkan satu pendekatan secara umum bagi semua misi karena dari perspektif Negara penyumbang tentara dan polisi penjaga perdamaian suksesnya suatu misi akan tergantung dari memadainya persiapan sebelum misi yang di dasarkan pada pemahaman mengenai kebutuhan dan kondisi setempat. Penguatan kemampuan berinteraksi dengan komunitas setempat artinya kemampuan pasukan penjaga perdamaian harus melampaui kemampuan dasar prajurit dan dilengkapi dengan kemampuan "lunak" seperti komunikasi dan membangun kepercayaan. Pemajuan peranan perempuan artinya Perempuan lebih efektif dalam memenangkan hati dan pikiran penduduk setempat sehingga Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan peranan perempuan sebagai agen perdamaian. Yang tidak kalah pentingnya ialah kemitraan internasional yang memiliki arti dengan semakin kompleksnya tantangan yang di hadapi, pelatihan harus menjadi lebih adaptif. Namun, beberapa Negara memberikan tanggapan bahkan kritik. Antara lain, Republik Dominika, Kuwait, Inggris, Federasi Rusia, dan beberapa Negara lainnya menyatakan, peningkatan misi perdamaian PBB harus juga diikuti dengan skill dan kemampuan dari penjaga perdamaian tersebut. Peningkatan kuantitas harus diikuti dengan peningkatan kualitas juga, sehingga tidak hanya mendapat apresiasi atas jumlah Penjaga Perdamaian yang dikirim, tetapi juga dengan dampak yang diberikan, dan hasil dari misi tersebut.

Keunikan terjadi dalam sidang tersebut, yaitu banyaknya diplomat asing dari berbagai Negara yang menggunakan batik sebagai apresiasi Presidensi Indonesia. Di akhir sidang tersebut Indonesia merasa berbesar hati karena Dewan Keamanan telah menyetujui pernyataan presidensial terkait isu ini.

Kedua, Sidang terbuka mengenai perlindungan warga sipil pada konflik bersenjata. Debat terbuka ini menegaskan kembali dukungan Indonesia dalam memperkuat kemitraan internasional untuk pemajuan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata. Kontribusi Indonesia selama ini tercermin melalui peran aktif Indonesia dalam mendukung isu perlindungan penduduk sipil di berbagai forum internasional dan melalui pemberian bantuan teknis kepada berbagai Negara di bidang tata pemerintahan yang baik. Menurut Menlu RI Retno Marsudi pemberdayaan komunitas merupakan elemen kunci peningkatan kapasitas Negara dalam perlindungan penduduk sipil. Partisipasi komunitas lokal dalam merancang dan melaksanakan program perlindungan penduduk sipil dibutuhkan agar dapat dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran. Adapun dalam sidang tersebut ada beberapa poin yang diperbincangkan. Pertama kapasitas nasional Negara-negara yang bersangkutan harus diperkuat artinya tugas untuk melindungi warga sipil utamanya terletak di tangan Negara yang bersangkutan. Khususnya, dalam menegakkan aturan hukum dan membangun tata pemerintahan yang baik. Namun demikian, karena Negara-negara yang terdampak konflik sering kali memiliki kapasitas terbatas untuk melakukannya, kemitraan internasional menjadi sangat penting dalam mengatasi akar penyebab konflik, sehingga mereka dapat keluar dari konflik menuju masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Selain itu,

keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat juga memainkan peran penting dalam mengembangkan kapasitas nasional. Dalam hal ini, program perlindungan warga sipil harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak. Dalam sidang tersebut Indonesia menekankan bahwa Indonesia telah berperan secara proaktif dalam upaya memberdayakan masyarakat Palestina untuk memungkinkan mereka mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar. Antara lain, dengan membangun sebuah rumah sakit di Gaza, yang telah menyediakan perawatan kesehatan yang sangat dibutuhkan, yang mengurangi penderitaan warga sipil yang hidup di bawah pendudukan. Kedua, memastikan implementasi dan kepatuhan yang efektif adalah kunci. Point kedua ini membutuhkan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia baik oleh aktor-aktor Negara maupun non-negara. Ketiga, Dewan Keamanan PBB harus mencari cara-cara inovatif dan praktis untuk melindungi warga sipil di lapangan. Artinya keterampilan dan kapasitas pemelihara perdamaian dan aktor kemanusiaan harus terus diperbaharui dan diperkuat sehingga mereka dapat lebih siap dalam menangani tantangan baru yang muncul di lapangan. Sidang terbuka ini pun mendapat tanggapan dan perhatian dari Negara lain. Antara lain, Afrika Selatan yang menyatakan untuk tetap menghormati kedaulatan Negara yang berkonflik, agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam perlindungan warga sipil

Ketiga, komitmen Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina tergambar jelas selama periode Presidensi. Indonesia mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan diskusi informal *Arria Formula*. Pertemuan *Arria Formula* adalah pertemuan informal anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang harus diselenggarakan oleh anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar pertemuan dapat berlangsung. Meskipun berasal dari pertemuan formal DK PBB, *Formula Arria* membedakan dirinya dari pertemuan DK PBB yang khas karena sifatnya yang informal, yang memungkinkan pertemuan *formula Arria* tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan resmi pertemuan DK PBB yang khas. Ini berarti bahwa sementara pertemuan reguler Dewan Keamanan memerlukan kehadiran semua 15 anggota dewan, mengikuti struktur formal, dan tidak mendengarkan kesaksian dari non-anggota, individu atau organisasi non-pemerintah, pertemuan formula *Arria* memungkinkan individu, organisasi, aktor non-negara dan delegasi tinggi (dari negara-negara anggota PBB yang tidak terwakili di Dewan Keamanan) untuk terlibat dalam dialog langsung dengan anggota DK PBB dalam pengaturan yang sah dan rahasia. Khususnya, pertemuan formula *Arria* dipimpin oleh seorang anggota DK PBB, yang bertindak sebagai fasilitator diskusi, bukan Presiden Dewan Keamanan. Kadang-kadang, pertemuan juga diadakan bekerja sama dengan negara-negara yang bukan anggota dewan yang menganggap akan bermanfaat untuk mendengar dari individu, organisasi atau lembaga tertentu.

Dalam pertemuan kali ini Indonesia menyelenggarakan Diskusi informal *Arria Formula* untuk menyoroti pelanggaran atas pembangunan pemukiman Israel di wilayah pendudukan. Menurut Menlu RI Retno Marsudi, Indonesia akan selalu memastikan bahwa isu palestina tetap menjadi perhatian utama DK PBB, menghidupkan kesadaran kolektif atas perjuangan bangsa Palestina dan secara bersamaan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dalam pertemuan tersebut Indonesia mengedepankan beberapa hal. Tindakan Israel bagi Indonesia menempatkan solusi dua Negara dalam bahaya, artinya keberlangsungannya terkikis setiap hari oleh pemukiman ilegal yang bertujuan untuk mengubah komposisi demografi, karakter, dan status wilayah Palestina yang diduduki secara paksa. Permukiman ini bagi Indonesia jelas merupakan sebuah bentuk aneksasi *de facto*. Perhatian berikut bagi Indonesia ialah kegiatan pemukiman merupakan sumber, dan dalih untuk kebijakan melanggar hukum lainnya dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Hal yang menjadi perhatian terakhir Indonesia dalam diskusi formal tersebut ialah jika hal tersebut tidak dapat dikendalikan, dapat menyebabkan siklus konflik dan kekerasan yang tak terhentikan. Diskusi ditutup dengan statement Indonesia yang menegaskan bahwa "Kita tidak boleh berhenti sampai Palestina berdiri berdampingan sejajar dengan semua bangsa di dunia" menandakan Isu Palestina akan mendominasi dalam keanggotaan Indonesia di DK PBB.

Hal ketiga yang menjadi agenda utama dalam presidensi Indonesia ialah Pameran foto di markas besar PBB. Adapun kegiatan tersebut merupakan *side event* yang bertempat di markas besar PBB New York. Menampilkan berbagai bentuk kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia, melalui berbagai pilar perdamaian seperti: pembangunan, demokrasi, kemanusiaan, dan

pemberdayaan perempuan. Foto yang menunjukkan pelatihan yang diselenggarakan Indonesia bagi perempuan Palestina pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan tersebut. Tentunya setiap gambar di pameran tersebut memiliki cerita. Mengenai rumah sakit yang di bangun di Gaza, mengenai pasukan penjaga perdamaian Indonesia, mengenai kemitraan pembangunan, antara lain dengan Negara-negara kawasan Pasifik dan Afrika. Kegiatan ini pun dilakukan juga merupakan salah satu sarana diplomasi Indonesia melalui diplomasi foto yang mengenalkan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia. Sampai dengan kegiatan tersebut yaitu pameran foto, isu Palestina tetap tergambar dalam masa presidensi Indonesia yang terbilang singkat namun memiliki pengaruh yang kuat dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pameran foto yang bertajuk tema menabur benih perdamaian pun di tutup tepat pada tanggal 17 Mei 2019 dengan antusiasme yang tinggi dari Negara-negara anggota PBB.

Kegiatan utama Indonesia yang terakhir, ditutup dengan resepsi Diplomatik dan Pertunjukan Budaya Indonesia. Hal ini secara tidak langsung menandai berakhirnya Presidensi Indonesia yang dimanfaatkan untuk menunjukkan kekayaan budaya Indonesia dan sekaligus menggalang dukungan bagi pencalonan keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM periode 2020-2022. Adapun budaya yang ditampilkan ialah dekorasi tradisional khas Indonesia, sajian nusantara, dan pertunjukan Tari Saman Gayo Aceh. Menurut, Duta Besar Dian Djani Wakil Tetap RI untuk PBB, Indonesia mengakhiri masa presidensinya dengan menunjukkan kebudayaan Indonesia, sambil terus berharap kerja sama dan kolaborasi yang telah di ciptakan akan terus bertahan dan memiliki dampak yang besar.

Indonesia dalam masa presidensinya selain melakukan Agenda utama juga melakukan berbagai kegiatan yang tetap di perhitungkan maknanya dan dampak bagi perdamaian Dunia. Tercatat Indonesia menyelenggarakan 46 aktivitas yang terdiri dari, 15 *briefing* terbuka, 14 konsultasi tertutup, 2 sidang terbuka tingkat menteri, 3 pertemuan *Arria Formula*, 1 *retreat* Sekjen PBB, 2 pertemuan dengan LSM, *Working Breakfast*, *Working Dinner*, *Security Council Informal Talk* (kegiatan baru yang diinisiasi Indonesia), Pertemuan dengan Organisasi Regional perihal pertemuan informal mengenai perkembangan kawasan. Kegiatan *sofa talk* merupakan salah satu capaian Indonesia di masa presidensinya, kegiatan tersebut adalah pertemuan informal di antara para Wakil Tetap (Duta Besar) anggota DK PBB dalam bentuk *sofa talk* yang diselenggarakan di kantor PTRI New York, berbeda dengan pertemuan formal DK PBB lainnya, pertemuan ini dilakukan dengan menggunakan kursi sofa tanpa meja kerja dan yang paling penting tanpa suatu agenda khusus. Pertemuan dihadiri tanpa staf masing masing Duta Besar dan pembahasannya tidak di rekam. Indonesia juga mendapat sambutan positif dalam inisiatifnya menyelenggarakan *Regional Wrap-Up Session* yang dimana Indonesia sebagai Presiden DK PBB mengundang Negara-negara anggota tidak tetap DK PBB yang mewakili kawasan-kawasan regional yang berbeda guna menyampaikan *assessment* terhadap kegiatan DK di masa presidensi Indonesia,

Selama masa Presidensi Indonesia, alat diplomasi Indonesia tidak hanya berjalan secara multilateral yang mana Indonesia merupakan Anggota tidak tetap DK PBB, namun alat diplomasi Indonesia juga berjalan secara bilateral. Adapun selain agenda utama (*Signature Events*) di masa presidensi Indonesia, agenda lainnya diinisiasi dan dijalankan Indonesia. antara lain Indonesia melakukan upaya perdamaian melalui jalur bilateral di sela-sela presidensinya. Palestina juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertemuan tersebut. Dalam kunjungan Menlu RI Retno Marsudi ke New York di minggu pertama Presidensi DK PBB Indonesia diwarnai ketegangan baru dalam konflik Israel-Palestina. Menlu RI melakukan pembicaraan melalui telpon dengan utusan khusus PBB untuk proses perdamaian di Timur Tengah, serta menyelenggarakan serangkaian pertemuan dengan Duta besar atau wakil tetap Mesir, Sekretaris Jenderal PBB, dan Menlu Palestina Riyad al-Maliki. Pembicaraan dan pertemuan tersebut menekankan kembali dukungan Indonesia pada perjuangan Palestina. Di samping itu, Menlu RI juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral untuk membahsa sejumlah kerja sama bilateral sekaligus menggalang dukungan terhadap pencalonan Indonesia di Dewan Ham pada 2020-2022.

Dalam setiap masa presidensi Anggota DK PBB, hasil dari masa presidensinya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan selama suatu Negara menjabat, mengingat hasil dari setiap presidensi bisa menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya kepemimpinan di bawah Negara yang menjabat sebagai Presiden DK PBB. Di bawah Presidensi Indonesia pada

bulan Mei 2019, telah dihasilkan 11 produk yang merupakan hasil dari usaha Indonesia. Indonesia mendorong bina damai di berbagai wilayah konflik dan mengadopsi 4 resolusi (UNISFA, UNAMI, AMISOM, Sanksi Sudan Selatan), menghasilkan satu *presidential statement* yang merupakan dokumen DK PBB pertama yang secara khusus membahas aspek pelatihan dan peningkatan kapasitas MPP PBB. Menghasilkan *tiga Press Statements* dan *tiga Press Elements*.

Melihat lancarnya alat diplomasi Indonesia baik terhadap Negara-negara (bilateral) maupun organisasi internasional (multilateral), menjadikan fokus Indonesia terhadap organisasi regional tidak kelihatan, dan secara tidak langsung penyelesaian masalah atau konflik di masa Presidensi Indonesia ditempuh tanpa jalur organisasi regional yang dimana organisasi regional berperan penting dalam penyelesaian konflik internasional. Dalam hal Isu Palestina Indonesia tetap menjadikan fokus utamanya di masa presidensi Indonesia bulan Mei 2019.

D. Penerapan Isu Prioritas Indonesia

Prioritas Indonesia yang dituangkan dalam 4 prioritas dan 1 perhatian utama dalam keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan, berangkat dari isu prioritas tersebutlah, maka Indonesia dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuannya. Menurut Portal Kemlu RI, konsep mengenai keanggotaan Indonesia di DK PBB telah di susun jauh sebelum Indonesia menduduki kursi anggota tidak tetap DK PBB. Dalam hal ini artinya, perumusan dan eksekusi dari isu prioritas dapat dikatakan telah di pahami dan dapat dijalankan dengan baik, melihat dari persiapannya yang cukup lama. Presidensi Indonesia telah dilaksanakan, dengan mengangkat isu-isu internasional dan mengagendakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perdamaian dunia. Namun, dalam prakteknya isu-isu prioritas Indonesia belum terlihat dijalankan dan terakomodir di masa presidensinya, dalam hal prioritas dari masa presidensi Indonesia, isu palestina sangat mendominasi dan menonjol dalam setiap kegiatan ataupun agenda yang di lakukan dan di bahas oleh Indonesia.

Adapun kegiatan-kegiatan utama atau *Signature Events* di masa presidensi Indonesia menjadi fokus atau perhatian Negara-negara di DK PBB mengingat hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut memiliki dampak yang besar bagi perdamaian dunia. Hal tersebut dapat bermakna baik bagi Indonesia mengingat adanya isu-isu prioritas yang bisa dimasukkan dalam *Signature Events*, sehingga tujuan Indonesia bisa tercapai. Melihat dari presidensi Indonesia ada beberapa kegiatan yang mengangkat isu-isu prioritas Indonesia. Namun, sayangnya ada beberapa isu prioritas yang tidak di angkat dan kurang maksimal di masa presidensi Indonesia.

a. Isu Pertama

Dalam hal prioritas yang pertama yaitu, melanjutkan kontribusi Pemerintah RI dalam upayanya mewujudkan perdamaian dunia, antara lain melalui memperkuat ekosistem/geopolitik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan Peningkatan *Peacekeeping* dan *Peacebuilding*, Peningkatan kualitas dan keefektifan misi pemeliharaan perdamaian. Memajukan kemitraan "*partnership*" dalam *sustaining peace*; dan Meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian. Dalam hal tersebut Indonesia menjadikan isu tersebut sebagai salah satu kegiatan utama Indonesia di masa presidensinya. Berangkat dari pandangan Indonesia bahwa partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian (MPP) PBB merupakan wujud konkret dari komitmen konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD RI 1945, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan anggapan Indonesia bahwa pasukan penjaga perdamaian perempuan lebih efektif dalam memenangkan hati dan pikiran penduduk setempat, serta memberikan rasa nyaman bagi mereka yang trauma akibat konflik, serta adanya bukti bahwa perempuan dalam proses perdamaian meningkatkan kemungkinan terciptanya perdamaian yang lebih langgeng sebesar 20%, sehingga berkontribusi pada perdamaian yang lebih berdaya-tahan.

Berdasarkan pemahaman yang di berikan Indonesia, menjadikan isu tersebut menjadi bagian utama dalam masa presidensi Indonesia. Menurut buku "menabur benih perdamaian Kemlu RI" Isu prioritas yang pertama ini menjadi pokok pembahasan yang mendapat tanggapan yang banyak dari masyarakat internasional yang diwakili oleh Negara-negara yang hadir dalam sidang tersebut. Tanggapan yang tersorot adalah anggapan bahwa peningkatan kuantitas Penjaga Perdamaian harus diikuti dengan kualitas dari penjaga perdamaian tersebut, agar tidak

sekadar mendapat apresiasi atas banyaknya misi dan penjaga perdamaian yang dikirim, namun dampak dan manfaat yang timbul dari misi yang dijalankan. Namun demikian, dari pertemuan tersebut menghasilkan *Presidential Statement* mengenai upaya untuk terus memperkuat pelatihan dan kapasitas *peacekeepers* menuju peningkatan kinerja MPP PBB. Dengan hasil yang ada membuat Indonesia bisa menerapkan isu prioritasnya yang pertama di masa presidensi bulan Mei DK PBB.

b. Isu Kedua

Membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan merupakan isu prioritas yang kedua bagi Indonesia di dalam keanggotaannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Presidensi Indonesia telah terlaksana dengan beragam agenda, namun sayangnya, isu yang kedua ini tidak dibahas dan bukan merupakan *Signature Events* dalam masa presidensi Indonesia. Isu ini tidak di agendakan, namun ada beberapa pertemuan dengan organisasi regional yang sekadar pertemuan informal dan tidak adanya peningkatan sinergitas antara DK PBB dengan organisasi regional. Isu ini menjadi penting mengingat upaya perdamaian di berbagai kawasan di dunia tidak hanya menjadi tugas DK PBB melainkan memerlukan dukungan dan peran dari organisasi kawasan sebagai *first responder* dan juga sebagai pihak yang lebih memahami karakteristik konflik di kawasan tersebut. Sinergi antara DK PBB sebelum Indonesia bergabung dalam DK PBB memang mulai terbangun, namun di masa Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia bertekad untuk meningkatkan sinergitas antara organisasi regional dengan DK PBB.

Menurut Direktur Afrika Kemlu RI, menyatakan bahwa agenda organisasi regional khususnya wilayah Afrika dimana Kemlu RI bertujuan untuk menindaklanjuti janji kampanye Indonesia untuk menyuarkan fokus Negara-negara Afrika serta mengeksplorasi potensi kerja sama konkret akan dilakukan tidak di masa presidensi Indonesia, berbeda dengan Negara-negara pendahulu yang memegang presidensi, melakukan pertemuan di saat masa presidensinya berlangsung, mengingat pengaruh, kuasa, dan dampak yang di hasilkan dari presiden DK PBB cukup besar di banding Negara yang duduk sebagai anggota.

Masa presidensi Indonesia khususnya dalam implementasi isu yang kedua, merupakan kesempatan yang berpotensi memiliki dampak besar di kawasan Asia tenggara. Asean sebagai organisasi kawasan yang mengenal jelas karakteristik masing-masing negaranya, menjadikan potensi terciptanya perdamaian di wilayah Asia Tenggara menjadi mungkin, mengingat konflik dan pertikaian internasional sedang terjadi di wilayah tersebut. Laut China Selatan dan Isu Myanmar merupakan isu yang sedang menjadi fokus internasional, hal tersebut semestinya menjadikan Indonesia mampu menggunakan posisinya untuk mengangkat agenda peningkatan sinergitas organisasi regional. Wilayah Asia lainnya pun sedang dilanda konflik, sebagai perwakilan wilayah Asia Pasifik, Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut. Sebagaimana dasar Indonesia untuk melakukan kebijakan di DK PBB antara lain yaitu Politik Luar Negeri yang bebas aktif, menjadikan Indonesia bebas dan tidak terikat ataupun di bungkam dalam pengangkatan agenda untuk di bahas, di diskusikan dan di cari solusinya secara kolektif. Isu-isu yang sensitif terlebih menyangkut organisasi di kawasan termasuk Negara-negara di dalamnya menjadikan beberapa Negara enggan untuk mengangkat isu-isu tersebut ke permukaan terlebih di forum internasional seperti PBB. Tidak adanya agenda utama dalam masa presiden Indonesia, menandakan belum maksimalnya penerapan isu prioritas yang utamanya ingin menciptakan perdamaian dunia melalui jalur sinergitas antara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Organisasi Regional.

c. Isu Ketiga

Dalam hal isu prioritas yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan DK PBB untuk memerangi terorisme, ekstremisme, dan radikalisme, Menciptakan pendekatan komprehensif, Mengatasi sumber akar dari terorisme, radikalisme dan *violent extremism* menjadikan Indonesia mengaitkan hal tersebut dalam agenda utamanya yang pertama yaitu sidang mengenai peningkatan keamanan dan misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Terorisme, eksterimisme, dan radikalisme sering menjadi bagian dari Negara yang dilanda konflik. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk berupaya menggalang dukungan

Negara-negara sebagai aktor utama untuk bersama-sama meningkatkan kinerja dari penjaga perdamaian dengan demikian akan terciptanya kondisi yang aman dan stabil. Dalam pidato Menlu RI Retno Marsudi dalam pembukaan sidang terbuka tersebut menyatakan bahwa Indonesia percaya sepenuhnya pada misi pemeliharaan perdamaian, dan meyakini perlunya persiapan yang cukup bagi mereka, serta berinvestasi bagi kinerja mereka. Karena, berinvestasi bagi pasukan perdamaian, berarti berinvestasi bagi perdamaian itu sendiri,

Dalam isu prioritas yang ketiga ini, Indonesia menggunakan jalur penjaga perdamaian untuk menanggulangi terorisme, eksterimisme, dan radikalisme. Jalur yang dipercaya Indonesia akan membawa dampak yang besar. Hal tersebut berkesinambungan dengan isu yang pertama dalam meningkatkan misi perdamaian yang mendapatkan tanggapan dari berbagai Negara untuk bukan hanya meningkatkan kuantitasnya saja melainkan kualitasnya ikut ditingkatkan.

d. Isu keempat

Mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Memastikan perdamaian, keamanan dan stabilitas untuk memastikan pemenuhan Agenda 2030 (Sustainable Development Goals), termasuk di Afrika merupakan isu prioritas yang tidak terpisahkan dalam keanggotaan Indonesia di DK PBB. Isu yang keempat ini secara spesifik mengaitkan perdamaian dengan *Sustainable Development Goals* (SDG'S) di dalamnya Indonesia memprioritaskan Afrika dalam upaya penciptaan perdamaian namun disisi yang lain juga untuk memenuhi agenda dari SDG'S.

Upaya penciptaan perdamaian bagi Indonesia tidak dapat mengabaikan berbagai faktor non-keamanan yang dapat menjadi akar penyebab konflik. Kenyataan yang terlihat dari sejumlah konflik yang terjadi di kawasan Afrika bahwa akar penyebab konflik banyak disebabkan oleh faktor antara lain kemiskinan. Ketimpangan ekonomi, kesejahteraan, perebutan akses terhadap sumber daya alam, dan juga dampak perubahan iklim. Bagi Indonesia dalam hal ini isu diangkat karena pandangan Indonesia bahwa perdamaian lebih luas dari sekadar ketiadaan perang. Aspek pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan Hak Asasi Manusia, pemajuan proses politik yang inklusif dan demokrasi juga harus menjadi perhatian utama untuk mencapai perdamaian.

Di masa presidensi Indonesia, publik internasional kembali diperlihatkan dengan kemampuan diplomasi Indonesia mengenai penciptaan perdamaian. Namun upaya penciptaan perdamaian guna terlaksananya pembangunan berkelanjutan belum terlihat di bahas secara spesifik oleh Indonesia. Upaya penciptaan perdamaian yang dilakukan Indonesia hanya berdasar pada peningkatan misi pemeliharaan perdamaian, yang bagi Indonesia merupakan jalan terbaik dalam menciptakan perdamaian. Pembangunan ekonomi, lingkungan hidup dan aspek lainnya dalam SDG'S masih belum terealisasi di masa presidensi Indonesia. Adapun fokus Indonesia dalam upaya bina perdamaian di saat masa presidensinya masih berfokus pada faktor-faktor keamanan dan belum fokus pada faktor-faktor keamanan sebagaimana dasar perumusan isu yang keempat ini.

e. Isu Palestina

"Dalam setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ terdapat keberpihakan terhadap Palestina" dikutip dari pernyataan luar negeri Presiden RI Joko Widodo. Isu yang menjadi perhatian utama dalam keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB ialah isu Palestina. Di masa presidensi Indonesia isu Palestina menjadi bagian utama yang tidak terpisahkan dalam setiap kebijakan Indonesia di DK PBB. Indonesia mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan dalam format *Arria Formula* mengenai pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina (*Arria Formula on Israeli Settlements and Settlers: Core of the Occupation, Protection Crisis and Obstruction of Peace*). Dalam pertemuan tersebut Indonesia menyerukan pentingnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, khususnya dalam kerangka resolusi 2334 DK PBB. Menlu RI Retno Marsudi memimpin langsung pertemuan tersebut dan menghadirkan Menlu Palestina dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesia tersebut.

Menlu RI Retno Marsudi, dalam sidang *Arria Formula* yang diselenggarakan oleh Indonesia menyatakan bahwa, nasib rakyat Palestina sampai saat ini masih suram, Publik Internasional dalam hal ini DK PBB tidak boleh kehilangan harapan dan kemauan untuk

menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi melalui multilateralisme, sebagai mitra sejati untuk perdamaian Indonesia akan terus berusaha keras untuk memastikan agar masalah Palestina tetap menjadi salah satu fokus utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam halnya usaha perdamaian Palestina, Indonesia mengedepankan jalur multilateralisme dalam hal ini Dewan Keamanan PBB untuk mengambil bagian dalam proses perdamaian. Isu prioritas Indonesia ini dapat dikatakan mendominasi di masa presidensi Indonesia, sekaligus dapat dikatakan cukup berhasil menyadarkan publik internasional mengenai betapa pentingnya nasib dan keadaan rakyat Palestina.

Palestina di masa presidensi Indonesia sangat merasa diuntungkan dan diprioritaskan di antara Negara-negara yang sedang di landa konflik. Bagi Palestina Indonesia merupakan mitra sejati dalam upaya perdamaian dan penyelesaian konflik di negaranya. Isu Palestina di DK PBB bagi Indonesia sama halnya dengan menjalankan amanat UUD 1945.

Keempat isu prioritas dan satu perhatian utama menjadi acuan Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian di DK PBB. Penyelenggaraan presidensi Indonesia telah dilaksanakan dengan isu Palestina menduduki isu yang paling di prioritaskan, diikuti dengan isu pertama dan ketiga yang di terapkan dalam agenda di masa presidensi Indonesia. Penerapan isu-isu tersebut berhasil menyadarkan dunia internasional mengenai betapa pentingnya upaya perdamaian. Namun tugas Indonesia di DK PBB dilihat dari penerapan isu prioritasnya belum bisa berhasil, pasalnya terdapat dua prioritas Indonesia yang sangat penting dan memiliki peluang penciptaan perdamaian yang besar yang belum bisa terealisasi dan dilakukan di masa presidensi Indonesia baik dalam agenda utama (*signature events*) yang menghimpun berbagai pihak dan dapat memberikan dampak yang besar ataupun pertemuan informal yang sekadar *sharing* untuk mencari solusi terbaik dalam menciptakan suatu perdamaian.

E. Upaya Indonesia Dalam Menerapkan Dan Mempertahankan Isu Prioritasnya.

Dalam halnya isu pertama, dimana dituangkan dalam agenda utama yang pertama mengenai sidang terbuka dalam rangka peningkatan MPP PBB, beberapa Negara memberikan tanggapan bahkan kritik. Antara lain, Republik Dominika, Kuwait, Inggris, Federasi Rusia, dan beberapa Negara lainnya menyatakan, peningkatan misi perdamaian PBB harus juga diikuti dengan skill dan kemampuan dari penjaga perdamaian tersebut. Peningkatan kuantitas harus diikuti dengan peningkatan kualitas juga, sehingga tidak hanya mendapat apresiasi atas jumlah Penjaga Perdamaian yang dikirim, tetapi juga dengan dampak yang diberikan, dan hasil dari misi tersebut. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa upaya Indonesia dalam halnya menerapkan isu yang pertama sedikit terkendala dikarenakan banyak Negara yang tidak melihat dari sisi kuantitasnya saja melainkan kualitasnya.

Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Indonesia di Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk mempersekusi, merehabilitasi, dan mengintegrasikan pelaku terorisme. AS mengatakan resolusi itu tidak membahas bagian penting mengenai repatriasi pejuang asing ISIS dan keluarga mereka. Menurut Duta Besar AS untuk PBB menyatakan bahwa "Resolusi Indonesia di hadapan kami ini, yang harusnya memperkuat tindakan masyarakat internasional dalam kontra terorisme, lebih buruk dibandingkan tidak ada resolusi sama sekali."

Sebagai ketua Dewan Keamanan PBB, Indonesia mengajukan resolusi ini. Hasil pemungutan suara menunjukkan 14 negara mendukung resolusi tersebut dan AS memvetonya. AS mendorong agar pejuang asing ISIS dipersekusi dan rehabilitasi di negara asal. Tapi negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis tidak setuju karena khawatir ada penolakan keras dari masyarakat atau serangan terorisme di wilayah mereka. Negara-negara Eropa juga menilai akan sulit mengumpulkan bukti kejahatan warga mereka yang berperang untuk ISIS di Irak dan Suriah. Sementara resolusi Indonesia menyebutkan anak-anak pejuang asing dipulangkan ke Negara asal seperti yang seharusnya dan berdasarkan kasus perkasus.

Setelah ISIS kehilangan banyak wilayah mereka di Suriah, pasukan Kurdish Syrian Democratic Forces (SDF) menawan ribuan pasukan asing di timur laut negara itu. Kamp-kamp yang didirikan SDF sebagian besar dihuni perempuan dan anak-anak.

PBB mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai buruknya kondisi di kamp-kamp yang terkenal sangat kumuh dan padat itu. Pihak berwenang menyebut resolusi untuk mengatasi masalah pejuang asing dan keluarga mereka sangat penting untuk mencegah bangkitnya aktivitas terorisme.

Menurut Juru Bicara Kemlu RI menyatakan bahwa "Kami menyesal resolusi ini tidak diadopsi. Kami bekerja sama erat dengan mitra internasional untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan pejuang asing pada kami,"

Selain itu upaya Indonesia dalam mempertahankan Isu Palestina terlihat jelas ditentang oleh Amerika Serikat, dimana dalam masa Presidensi Indonesia, Amerika Serikat terus menyerukan dan menggalang dukungan terhadap Israel dimana berbanding terbalik dengan upaya Indonesia untuk membuat Palestina merdeka.

F. Tantangan dan Hambatan Indonesia Dalam Menjalankan Isu Prioritasnya

Dilihat dari agenda utama (*Signature Events*) ataupun pertemuan informal di masa presidensi Indonesia, penerapan isu-isu prioritasnya belum mampu terakomodir dan menjadikan penerapannya kurang maksimal. Penerapan Isu prioritas Indonesia menjadi belum optimal dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhi, baik secara internal Indonesia maupun dari pihak eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mengambil bagian sehingga menjadikan beberapa isu prioritas Indonesia tidak terakomodir. Melihat pentingnya isu-isu tersebut menjadikan kesempatan emas yang belum bisa diambil dan dijalankan Indonesia harus terlewat.

Isu Palestina adalah fokus utama Indonesia, tercatat dalam lima agenda utama presidensi Indonesia, tiga diantaranya mengangkat isu palestina dan menyerukan perdamaian di palestina. Dilihat dari agenda informal lainnya tercatat palestina masih mendominasi. Pertemuan dengan Menteri luar Negeri palestina adalah pertemuan informal yang tersorot, pasalnya di masa presidensi Indonesia satu-satunya Negara yang ditemui dan melakukan pembahasan adalah Palestina. Pertemuan informal ataupun formal di masa presidensi Indonesia baik secara eksplisit dan implisit terdapat pembahasan mengenai palestina di dalamnya. Hal tersebut dijalankan karena kesepakatan ataupun kampanye yang di suarakan Indonesia untuk mengutamakan palestina. Indonesia tidak ingin merusak kepercayaan Negara-negara yang memilihnya terlebih Negara-negara yang memilihnya didominasi oleh Negara-negara timur tengah ataupun Negara-negara islam dan Negara-negara mayoritas penduduk islam. Dalam pidato Menlu RI Retno Marsudi menyatakan bahwa isu palestina tidak akan pernah terlewatkan di masa presidensinya. Hal tersebut semakin dikuatkan dengan munculnya pertemuan *Arria-formula* yang secara spesifik membahas konflik Israel-palestina di dalamnya. Penyadaran secara kolektif akan pentingnya isu palestina di galakkan Indonesia di masa presidensinya.

Dampak yang positif ialah terwujudnya janji kampanye kepada Negara-negara pendukungnya serta menjadikan Indonesia konsisten sejak awal untuk mendukung palestina terlihat di masa presidensinya, kesadaran publik internasional muncul dari isu palestina yang Indonesia angkat dengan mengangkat isu palestina di setiap kegiatannya, termasuk dalam hal informal seperti pameran foto, palestina menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dampak negatifnya ialah kepada internal Indonesia yang secara tidak langsung menggeser isu-isu prioritas Indonesia lainnya. Tercatat dalam masa presidensi Indonesia hanya dua isu yang dibahas selain isu palestina yang di terapkan, pasalnya porsi yang bisa diisi oleh isu-isu prioritas lainnya, tetapi diisi oleh isu palestina. Isu sinergitas organisasi regional yang memiliki peluang besar dalam penciptaan perdamaian belum bisa terakomodir, mengingat pertemuan yang diagendakan telah diisi oleh isu palestina, bahkan penyadaran publik internasional dalam hal ini DK PBB terhadap sinergitas organisasi regional seperti Asean yang Indonesia di dalamnya harus tergeser dengan pembahasan di mana Palestina diutamakan. Melihat isu sinergitas organisasi regional masih bisa dilakukan dengan isu palestina di dalamnya dengan meningkat sinergitas di mana organisasi wilayah palestina berada (Asia Barat Daya) akan menjadikan isu yang kedua tersebut dapat terakomodir dan menjadikan isu palestina tetap menjadi bagian di dalamnya.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara *middle power*. Istilah *middle power* merupakan konsep aktivisme Negara-negara *second tier* dalam hierarki dunia dalam hal ini Indonesia juga termasuk di dalamnya, sejalan dengan Emmers dan Teo, dimana Indonesia yang dikategorikan sebagai *middle power* didasarkan pada rendahnya ancaman keamanan kawasan serta keterbatasan sumber daya nasional sebagai suatu Negara berkembang. Karakteristik dasar bagi Indonesia yang merupakan salah satu *middle power*, Indonesia bersifat fleksibel dan memanfaatkan momentum termasuk dalam pelaksanaan politik luar negeri.

Dalam halnya Dewan Keamanan PBB, Indonesia sebagai Negara *middle power* dengan terbatasnya kemampuan Indonesia untuk mendorong semua Negara Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui ataupun mendukung isu-isu yang di inisiasi Indonesia, mengingat Dewan Keamanan terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Dimana Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ditempati oleh Negara-negara *super power*, dimana peranan Negara-negara *super power* di dalam Dewan Keamanan sangat berpengaruh ditambah dengan keberadaannya sebagai anggota tetap. Hal tersebut didasarkan pada keberadaan Negara-negara *super power* yang memiliki sumber daya nasional yang lebih besar dan pengaruh dari kebijakan luar negerinya yang lebih besar. Dalam halnya isu palestina, dalam masa presidensi Indonesia yang mengangkat isu konflik Israel-Palestina sebagai isu utama bukanlah merupakan suatu cara yang mudah untuk meyakinkan publik internasional mengenai perdamaian di Palestina dan mengikuti kemauan Indonesia, mengingat terdapat beberapa Negara *super power* yang ada dibelakang Israel, salah satunya yang paling mendominasi ialah Amerika Serikat yang secara besar-besaran menyatakan dukungannya terhadap Israel. Dengan peranan yang dimiliki *super power* membuat isu-isu prioritas Indonesia baik yang sudah terakomodir maupun belum menjadi terhambat. Walaupun isu di mana wilayah Indonesia berada yaitu stabilitas keamanan di Laut China Selatan yang dimana merupakan isu sensitif bagi Negara-negara di Asia Tenggara dan China. Dalam hal Dewan Keamanan PBB China merupakan Negara *Super Power* sekaligus sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menjadikan isu tersebut belum muncul di permukaan ataupun menjadi bagian dalam pembahasan di masa presidensi Indonesia.

Selain peran Negara-Negara *Super Power* yang besar, keberadaan hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak veto merupakan imbalan dari tanggung jawab negara pemenang perang dunia II terhadap tugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Keberadaan hak veto banyak mendapat kritikan masyarakat internasional karena dianggap bertentangan dengan prinsip Persamaan kedaulatan seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB. Prinsip persamaan kedaulatan dapat kita temukan di Declaration on Principles of International Law, Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations 1970 yang menyatakan bahwa semua negara dapat menikmati kedaulatan yang sama. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sebagai anggota yang sama dari masyarakat internasional dan tidak terhalang oleh perbedaan ekonomi, sosial, politik termasuk dalam hal kedudukan mereka dalam sebuah organisasi internasional. Keberadaan hak veto memunculkan anggapan bahwa kelima anggota tetap DK PBB memiliki kedudukan dan atau kedaulatan yang lebih tinggi diantara negara-negara anggota PBB yang lain. Hal ini terlihat ketika pemungutan suara di Dewan Keamanan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa semua anggota memiliki satu hak suara (tidak ada perbedaan antara anggota tetap maupun tidak tetap), namun Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa terkait perkara non prosedural maka keputusan harus disetujui oleh kelima anggota tetap baru kemudian keputusan tersebut dilaksanakan.

Perkembangannya saat ini, hak veto banyak disalahgunakan untuk kepentingan nasional Negara pemegang hak veto. Salah satunya pada kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines di Ukraina, Menteri Luar Negeri Ukraina mengatakan veto Federasi Rusia harus dilihat dalam konteks agresi terhadap negaranya. Penembakan MH17 merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan itu adalah tindakan yang disengaja. Beberapa Negara kemudian mengusulkan *draft* resolusi untuk keperluan pengusutan kasus tersebut dengan membentuk lembaga peradilan khusus. Sayangnya Rusia memveto *draft* resolusi tersebut karena menganggap persoalan tersebut merupakan kasus kecelakaan pesawat biasa dan tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Dari hal tersebut dalam terlihat bahwa peranan Negara-negara anggota tetap Dewan keamanan PBB ditambah dengan statusnya sebagai Negara *super power* menjadikan tantangan tersendiri dalam masa presidensi Indonesia.

Peran Seorang presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencakup perencanaan dan penerapan agenda, memimpin pertemuan dan mengawasi situasi krisis. Seorang presiden berhak untuk mengeluarkan pernyataan presidensiil dan catatan yang digunakan untuk menyatakan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh dewan keamanan. Hal yang memiliki dampak luar biasa tersebut dimiliki oleh setiap anggota yang digilir selama satu bulan dalam menjabat sebagai Presiden DK PBB. Masa presidensi terbilang sangat singkat

dengan agenda yang dipersiapkan masing-masing Negara. Melihat dari masa presidensi Indonesia, faktor masa jabatan yang terbilang singkat yaitu satu bulan, juga menjadi salah satu penentu penerapan isu prioritas Indonesia. tercatat di bulan Mei masa presidensi Indonesia, terdapat lima agenda utama yang dibahas dalam sidang atau pertemuan Dewan Keamanan PBB. Terdapat beberapa isu-isu prioritas Indonesia lainnya yang tidak terakomodir dikarenakan waktu yang sedikit dan pembahasannya yang memakan waktu.

Masa presidensi yang singkat menjadikan tantangan dan hambatan yang tersendiri bagi Indonesia, tujuan dan keinginan yang banyak menjadikan belum semua dapat terakomodir. Persiapan sebelum masa presidensi menjadikan hal yang penting salah satunya yaitu penyusunan agenda, mengingat di saat masa presidensi tidak ada agenda tambahan ataupun agenda baru, yang secara tidak langsung membuat Negara-negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memaksimalkan agendanya dalam penyusunan agenda di saat sebelum menjabat sebagai seorang Presiden Dewan Keamanan. Dan akhirnya dapat mengaplikasikannya ataupun merealisasikannya di masa presidensinya yang singkat dengan berbagai strategi diplomasi agar keinginan ataupun tujuannya tercapai demi kepentingan nasional dan upaya dalam penyelesaian konflik serta perdamaian dunia.

KESIMPULAN

1. Fokus utama Indonesia di masa presidensinya tertuju kepada isu Palestina. Tercatat dari lima Agenda utama Indonesia di Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tiga diantaranya mengangkat isu Palestina. Dalam pertemuan bilateral di sela-sela masa presidensi, Palestina tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kepemimpinan Indonesia. Hal tersebut menjadikan isu-isu prioritas lainnya seperti isu kedua mengenai peningkatan sinergitas organisasi regional dengan DK PBB dan isu keempat mengenai pembangunan yang berkelanjutan belum terakomodir serta tersisihkan karena dominasi isu palestina di masa presidensi Indonesia.
2. Adanya kekuatan anggota tetap yang juga merupakan Negara super power yang sekaligus juga memiliki hak veto, menjadikan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mengaplikasikan, mendorong serta memperoleh dukungan dari publik internasional.
3. Masa presidensi Dewan keamanan yang terbilang singkat yaitu 1 bulan yang digilir setiap anggota PBB menjadi salah satu faktor penerapan serta pengaplikasian isu-isu prioritas Indonesia belum maksimal, terlihat dalam 2 isu prioritas lainnya belum terakomodir dan menjadi agenda utama (*Signature Events*) di masa presidensi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Anwar Dewi Fortuna, 2000, *Menggagas Politik Luar Negeri Indonesia Baru*, Jakarta: LIPI
- Ardiansyah, Roni. 2019. *Relevansi Hak veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan asas persamaan Hak dalam konteks pasca perang dingin*. Jember: Universitas Jember.
- Arifin, Ali. 2010. *Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Konflik Israel-Palestina*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana
- Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Botodiningrat, S. 2012. *Perjalanan Politik Luar Negeri Republik Indonesia di kancah Global: sebuah refleksi*. Jurnal Diplomasi
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kementerian Luar Negeri. 2019. *Lensa Satu Tahun Indonesia di Dewan Keamanan PBB*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
- Kementerian Luar Negeri. 2019. *Menabur Benih Perdamaian Investing in Peace*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri.

- KJ.Holsti. 1987. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisa*. Bina Cipta
- Lott, A.D 2013. *Sejarah Hubungan Internasional, dalam Ilmu Politik dalam paradigm Abad ke-21 jilid 1*. Jakarta: Kencana
- Noor Boeike Adam. 2019. *Alasan Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Jakarta Pratama Ramadhan. 2020. *Peranan Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam menyelesaikan sengketa Nuklir Iran*. Padang: Universita Andalas
- Rosyidin, Mohamad. 2019. *Indonesia: Menuju Kekuatan Global Abad 21*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sefriani. 2019. *Hukum Internasional*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada

Website

- BBC News Indonesia. 2018. "Jadi anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan mewakili suara negara Muslim?"
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia4423370#:~:text=Dalam%20proses%20pemilihan%20tertutup%2C%20Indonesia,keanggotaannya%20berakhir%20pada%20Desember%202018>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2020
- HI.ID. 2020. "Indonesia Sebagai Middle Power - Perlucutan Senjata Nuklir dan Komitmen Politik Luar Negeri".
<https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/40?title=Indonesia+Sebagai+Middle+Power+-+Perlucutan+Senjata+Nuklir+dan+Komitmen+Politik+Luar+Negeri>. Diakses pada 5 maret 2021
- Indonesia Defense Magazine. "Capaian Sebulan Presidensi Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB".
<https://indonesiadefense.com/capaian-sebulan-presidensi-indonesia-dalam-dewan-keamanan-pbb/>. Diakses pada 5 Maret 2021
- Kemlu. 2019. "Keanggotaan Indonesia di DK PBB".
https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb. Di akses pada 30 Desember 2020
- Kompas. 2020. " Hak Veto PBB: Definisi, sejarah, dan perdebatannya"
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/213000169/hak-veto-pbb-definisi-sejarah-dan-perdebatannya?page=all>. Diakses pada 5 Maret 2021
- Kumparan. 2018. "Jokowi beberkan 4 Alasan Indonesia Terpilih jadi anggota DK PBB"
<https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-beberkan-4-alasan-indonesia-terpilih-jadi-anggota-dk-pbb>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2021.